

BOM DAN UNIKSITAS INDONESIA: “Mall”, Ekstasi Identitas, Terorisme, dan Negara

Sayfa Auliya Achidsti

Jurusan Administrasi Negara UGM, Koordinator Forum
Memahami Capaian Hasil Budaya Indonesia (Rumah Cahaya)

A. Nuansa dan Obat Penenang

Masih membekas dalam ingatan kita mengenai insiden bom beberapa saat lalu. Bom di Hotel J. W. Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 itu memang benar-benar tidak diduga sebelumnya oleh berbagai pihak. Nyatanya, semua terjadi begitu cepat, dan pagi itu belasan korban jatuh.

Segera setelahnya, televisi seakan menjadi mata dari masyarakat itu sendiri. Media begitu cermat mengawasi (red. Meliput) seputar lokasi bom, dan sebagai “selingannya” disertai pula dengan analisis-analisis beberapa ahli yang dinilai cukup berhubungan dengan bom beserta efeknya. Hal ini tentu erat kaitannya dengan ketakutan dan kekhawatiran seputar insiden (yang kesekian kalinya itu), dengan kemungkinan efek domino yang akan terjadi pasca bom. Akan tetapi, yang menjadi menarik adalah adanya beberapa fakta fakta dan analisis “sisipan” di

antara banyaknya berita lain yang mengulas mengenai tren masyarakat pasca bom. Disebutkan bahwa kegiatan masyarakat pasca bom relatif stabil; dalam artian aktivitas Jakarta dan sekitarnya tetap ramai, mall tetap dikunjungi pelanggannya, dan tempat wisata juga masih banyak didatangi pengunjung.

Satu hal menarik lagi bahwa nilai rupiah dan perekonomian dalam negeri tetap stabil, walaupun ada sedikit perubahan itu relatif jauh hubungannya dengan insiden bom. Bahkan hebatnya, saat ini muncul beberapa asumsi dan optimisme mengenai kondisi perekonomian dalam negeri. Terlepas dari insiden itu (red. mengesampingkan insiden bom?), dengan melihat kondisi negara lain dan terutama Amerika Serikat yang saat ini sedang dilanda “defisit anggaran” triliun dolar, maka akan mendorong investor untuk menarik dana dan dipindahkan ke tempat lain. Dan jika pengalihan dana itu benar-benar terjadi, maka Indonesia bisa mempersiapkan diri sebagai lahan potensial. pada level lebih tinggi lagi, imbas teros bom hanya sesaat saja, jauh dibanding sentimen positif dari pasca pemilihan umum yang sangat meyakinkan pasar. Peluang rupiah untuk tetap kuat dan menguat juga disinyalir dalam waktu dekat akan dicapai, hal ini karena adanya asumsi bahwa sentimen positif pasca ledakan bom relatif tinggi. Beberapa optimisme inilah yang mungkin dapat menjelaskan tren dan asumsi kenyalnya kondisi ekonomi secara makro dalam negeri.

Namun pertanyaannya adalah, apa ini bisa disebut kegagalan aksi teror? Atau memang kita adalah sebuah negara “kuat”? Mengapa bisa begitu? Kondisi tersebut itu mungkin “sedikit” meleset dari beberapa analisis mengenai kekhawatiran efek domino pasca bom. Kita masih ingat peristiwa pengeboman yang dilakukan teroris di Bali tahun 2002 dan 2005 yang mengakibatkan banyak kerugian dalam negeri. Nilai rupiah turun, bisnis lesu, dan tentunya sektor pariwisata sangat terganggu, masih ditambah lagi dengan penerapan travel warning atas Indonesia. Pasca kejadian Bom Bali I dan II tersebut, kondisi yang merugikan secara multidimensi dialami Indonesia.

Ditambah dengan adanya rencana agenda Manchester United yang akan datang ke Indonesia dan menempati hotel Ritz Carlton, hal tersebut semakin menimbulkan kekhawatiran.

Bagaimana tidak, klub kawakan kelas internasional asal Inggris tersebut direncanakan menginap di hotel yang sehari sebelum acara dibom. Klub internasional tersebut bisa menarik nafas lega karena, untungnya, bom meledak sebelum mereka menginap. Dan tentu secara logis, rentetan komponen peristiwa tersebut menimbulkan depresi kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat, dan terutama dari asing kepada Indonesia.

Namun yang kita alami sekarang ini agak sedikit “berbeda”, dan untungnya saja berbeda seperti ini. Masyarakat dan kondisi ekonomi dalam negeri diberitakan tidak terlalu tergoncang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tetap stabilnya kondisi pasca bom. Yang pertama adalah adanya persepsi mengenai keberhasilan menguak beberapa aktor aksi teror yang relatif lebih cepat, dibanding sebelum-sebelumnya. Hal ini membuat citra negara sebagai penjamin keselamatan rakyat meningkat. Kondisi ini amat berpengaruh pada tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman, baik pada masyarakat maupun juga para pelaku bisnis pada perkembangannya. Terlepas dari asumsi dan klaim bahwa kondisi ekonomi dalam negeri mempunyai tingkat kekenyalan dibanding negara lain, di sini sedikit banyak telah terbentuk sebuah pewacanaan yang menuansakan bahwa insiden bom 17 Juli lalu hanyalah kejadian “kecil” yang (diharapkan) tidak menggoncang kondisi secara makro.

Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan keberadaan media. Media massa adalah salah satu elemen penting yang berperan dalam kestabilan kondisi dalam negeri. Pewacanaan adalah satu kekuatan dari media massa dalam pengaruhnya dalam masyarakat dan kondisinya. Secara langsung maupun tidak langsung, media massa sanggup membangun sudut pandang dan penerimaan masyarakat atas segala sesuatu yang terjadi. Pada level yang lebih tinggi, media massa dapat membentuk mindset dan perilaku masyarakatnya. Sebuah berita, terlepas itu fakta atau tidak, secara intens akan membentuk sebuah pemahaman masyarakat dalam mengetahui dan menganalisis sesuatu yang terjadi. Media massa dapat membuat sesuatu tampak sebagai sebuah kebenaran, kesalahan, kewajaran, dan apapun yang berhubungan dengan persepsi.

Hal ini juga dipengaruhi oleh pola komunikasi dan interpretasi (sebuah tahapan sebelum mencapai sebuah persepsi), seperti yang telah dikemukakan Harold Laswell, yang mengacu pada analisis who-says-effect. Media massa, dengan berbagai liputannya mengenai beberapa aktivitas di seputar Jakarta pasca bom, secara tidak langsung membentuk penerimaan dan persepsi dalam masyarakat bahwa insiden bom ini adalah bukan suatu masalah besar dan akan terselesaikan.

Melihat dari segi psikologi dan tren dalam masyarakat, “rasa aman” juga terbentuk dengan adanya persepsi mengenai pola hubungan “siapa melawan siapa”. Pengalaman pada beberapa kejadian pengeboman, muncul sebuah bangunan imajiner bahwa insiden-insiden yang terjadi adalah permasalahan antara teroris yang dicitrakan dengan para fundamentalis agama, yang sedang melawan Barat dengan simbol-simbolnya; Hotel J. W. Marriot dan Ritz Carlton itu misalnya.

Terlepas dari semua itu, insiden pengeboman ini seharusnya menjadi sebuah shock therapy bagi kita semua. Kondisi yang pada akhirnya “tetap stabil” seperti ini tidak bisa disimpulkan sebagai kegagalan aksi teror. Aktivitas-aktivitas bawah tanah tersebut bagaimanapun tetap merugikan banyak pihak, terutama dari sisi moral, banyak kerugian lain yang dialami berbagai pihak.

B. Permasalahan Identitas

Tidak bisa disangkal, setiap individu mempunyai kebutuhan akan adanya identitas. Siapa dirinya dan apa perannya dalam kehidupan sekitar, menjadi hal yang sangat penting bagi siapapun. Hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan akan pengakuan orang lain atas dirinya. Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya* beberapa kali menerangkan era kolonialisme Belanda di mana politik identitas sangat kental di sana.¹ Persoalan identitas yang terlalu kuat dari warga Belanda yang datang dan tinggal di Nusantara mengakibatkan beberapa permasalahan. Mereka yang tinggal di Nusantara (warga Belanda)

¹ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya. Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

—jika tidak mau dibilang selamanya, paling tidak pada awalnya—teramat membatasi untuk berbicara langsung dengan orang pribumi. Pakaian mereka menunjukkan status mereka yang tinggi dan pribumi sebagai kelas di bawahnya. Bahkan, untuk persoalan minum pun, air yang dikonsumsi tidak mau dari lokal, melainkan mendatangkan dari negara luar yang dibekukan dalam bentuk es balok yang kemudian baru mau mereka minum. Erich Fromm, seorang filsuf Perancis, mengungkapkan mengenai beberapa kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan akan identitas inilah yang menjadi titik utama sebuah eksistensi dan entitas seseorang.

Identitas secara gamblang memang cukup abstrak untuk dijelaskan. Namun mari kita ambil contoh sederhana saja di mana kita analogikan sebuah identitas dalam bentuk paling nyata dan sederhana yaitu kartu pengenal. Dengan kartu pengenal sebuah perusahaan yang menempel di saku kanan kita misalnya, orang lain menjadi tahu mengenai nama kita, atau mungkin posisi kita dalam perusahaan itu, entah sebagai manajer, direktur, dan lain-lain. Dengan kartu pengenal itu pulalah dapat mempengaruhi sedikit banyak sikap orang lain kepada kita karena mereka mengetahui bagaimana kita sebenarnya, walaupun tidak semua. Intinya adalah pengakuan orang lain terhadap kita, dan tentunya kita akan merasa lebih dihargai jika sikap orang lain menunjukkan penghormatan kepada kita, karena mungkin identitas kita sebagai manajer, misalnya, diketahui orang lain tersebut.

Kasus pengeboman, misalnya saja Hotel J.W. Marriot dan Ritz Charlton beberapa saat lalu, menjadi bukti akan betapa pentingnya kebutuhan seorang manusia akan identitas dan penyimpangannya. Pelaku bom bunuh diri yang dilakukan teroris saat itu diketahui masih berumur muda, bahkan bisa dibilang remaja. Seorang pemuda berusia belia yang sejatinya itu masih dalam masa-masa bermain dan pencarian jati diri, didoktrinasi oleh jaringan teroris yang mengubah seluruh orientasi hidupnya. Pemilihan keputusan sebagai pelaksana bom bunuh diri yang tentunya menimbulkan konsekuensi kehilangan nyawa tersebut bukan dipilih tanpa alasan oleh si remaja tersebut. Terdapat beberapa alasan yang “masuk akal” bagi si Remaja itu untuk

memutuskan suatu pilihan besar mengakhiri hidupnya demi “Islam” yang diajarkan oleh “ustadznya”.

Alasan pertama, dan ini sebagai dasar semua alasan, seperti yang telah disebutkan, yaitu kebutuhan akan identitas diri. Terlepas dari bagaimana sifat masing-masing, semua remaja mutlak menginginkan sebuah pengakuan atasnya. Seorang remaja akan rela melepaskan kebebasannya untuk kemudian “ditukar” dengan pengakuan masyarakat sekitarnya atas keberadaan dan kelebihan dirinya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk mendapatkan “kader” sebagai pelaksana bom bunuh diri. Jika remaja menginginkan penghargaan atas eksistensi, jaringan teroris menyediakannya. Si aktor perekrut remaja benar-benar mendekati, dengan penuh penghargaan atasnya, dengan cara komunikasi yang menyenangkan, iming-iming pertemanan “abadi”, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa remaja yang terseret dalam jaringan teroris mempunyai kemungkinan latar belakang yang jauh dari kasih-sayang dan kehidupan sosial yang menghargai eksistensinya, bahkan dari level paling penting, keluarga. Hal ini menyebabkan si Remaja “tidak mengerti” apa itu kasih-sayang dan mencarinya di luar. Permasalahan besar jika yang memberi “kasih-sayang” dan pengakuan adalah pihak tidak bertanggung jawab tersebut. Seseorang itu (si Remaja) akan dengan mudah menganggap bahwa si Perekrut kader tersebut adalah orang yang selama ini dia cari, dan jaringan teroris adalah keluarga “sebenarnya” yang sedang membutuhkan keahliannya.

Jika kebutuhan akan identitas sudah, maka yang kedua ini dapat menjadi alasan tingkat lanjut mengapa si Remaja mau secara suka rela menjadi aktor bom bunuh diri dalam aksi teror. Agama dan “kebenaran mutlaknya” menjadi bumbu yang cocok dan efektif dalam menumbuhkan semangat holy war (perang suci). Setiap orang jelas mempunyai sebuah keinginan untuk membela sesuatu yang menjadi dasar hidupnya, dan sesuatu tersebut tentunya adalah hal yang besar yang dia letakkan jauh berada di posisi paling atas. Pewacanaan mengenai agama sebagai hal yang menempati posisi paling atas itu sangat relevan sehingga memudahkan pendekatan apapun untuk membangun pemikiran sedemikian rupa. Proses yang berjalan kemudian setelah pewacanaan bahwa agama merupakan suatu

hal yang paling tinggi dalam hidupnya adalah pewacanaan bahwa pembelaan atas agama adalah hal yang mulia yang akan meletakkan dirinya pada posisi yang suci karena usaha perjuangannya membela agama Tuhan tersebut. Pembangunan pola pikir biner pun tak ubahnya menjadi semacam bahan bakar yang kuat dalam hal penumbuhan semangat juang dalam pembelaan agama. Pola pikir biner yang memandang bahwa suatu hal tidak bisa dipahami sebagai wilayah kompromi dan abu-abu, melainkan menarik garis demarkasi yang jelas antara hitam dan putih, antara kebenaran dan kesalahan. Penempatan agama dan kepercayaan serta cara juang yang dia pegang diposisikan dalam wilayah kebenaran, dan konsekuensinya adalah hal-hal yang berada di luar wilayah itu adalah sebuah kesalahan yang dimaklumkan untuk ditiadakan.

Analogi dan penjelasan tersebut pun berlaku dalam kondisi berbeda, tidak terkecuali dalam aksi teror ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dasar agama yang menjadi dasar berbagai aksi teror tersebut benar dan sah? Semua agama melarang adanya pembunuhan, penghilangan nyawa manusia, dan perbuatan yang menimbulkan ancaman dan teror. Berbagai ayat-ayat kitab suci secara egois dimaknakan penafsirannya menurut mereka sendiri, dan didoktrinasikan ayat yang menyebut kata “jihad” kepada remaja-remaja yang haus akan pengakuan tersebut. Doktrinasi “agama” menjadi lebih berhasil dan memberikan efek militanisme, ditambah dengan adanya fakta bahwa pemahaman para remaja akan agama itu sendiri sangat minim.

Kebingungan dan ketidakjelasan akan orientasi/tujuan hidupnya di dunia pun mengakibatkan nyawa dan kehidupannya menjadi harga yang teramat murah, suka rela diberikan demi titel sebagai pahlawan agama dan iming-iming pahala yang akan dia dapat setelah mati. Sebuah pencarian bergeser menjadi kegamangan identitas yang tidak disadari. Remaja, bahkan siapapun, jika sadar akan perannya sebagai bagian dari kehidupan tidak akan sulit menemukan sebuah identitas sejatinya; mahasiswa berusaha dalam kemahasiswaannya, pelajar dengan semangat prestasinya, pemuda dengan usaha pembangunan desanya, dan lain-lain. Tentunya ini harus diawali dengan sebuah sikap inklusif dan keterbukaan diri, karena

doktrinasi menyimpang akan sangat mudah memasuki individu eksklusif yang tertutup.

Namun, jika dikaji lebih lanjut, rupanya persoalan tersebut tidak hanya berhenti hanya sampai pada aspek personal diri masing-masing individu. Persoalan seputar aksi militanisme dan terorisme bukan lagi hanya masalah psikologis semata dalam artian terbatas antara masing-masing personal, namun lebih pada persoalan sosial yang membutuhkan kajian lebih dalam hal sosiologis dan antropologisnya, dan mungkin beberapa dalam hal ekonomi karena entah mengapa pelaku aksi bom bunuh diri sampai saat ini diketahui berasal dari kondisi yang lemah ekonomi. Mengenai kebutuhan akan pengakuan, masih amat sedikit kajian yang benar-benar mendalam—atau mungkin malah belum ada, terlebih dalam hal penelitian—mengenai hubungan antara aspek ekonomi dengan fenomena terorisme ini.

Pada perkembangannya,— tanpa terlalu menggeneralisir semua—terdapat dikotomi antara ekonomi kuat dengan ekonomi lemah dalam hubungannya dengan konteks terorisme ini. Kelompok ekonomi kuat, dalam kaitannya dengan perspektif jihad secara agama, lebih condong pada sebuah pola pikir moderat yang menganggap bahwa bentuk dan format tindakan jihad dapat dilakukan dalam berbagai cara. Sebagai contoh saja, mereka berjuang dalam bidang pendidikan, sistem kenegaraan, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya menurut kemampuan yang itu mereka nilai lebih efektif untuk kemaslahatan umat. Pola pikir seperti moderat seperti itu cenderung telah mengakar seiring dengan kuatnya ekonomi kelompok bersangkutan. Berbeda halnya dengan kelompok ekonomi lemah yang dapat dengan mudah diubah secara perspektif mengenai apa itu jihad di jalan agama. Perspektif jihad yang dipahami akan mudah diwacanakan sebagai sebuah upaya pemberantasan segala hal yang dianggap bertentangan dengan jalan agama. Sebuah jihad adalah sebuah aksi konkrit yang tampak dan dapat diukur, salah satunya dengan jalan perang dan bom tersebut. Dilihat dari sisi kebutuhan setiap orang akan religiusitas, kebimbangan kelompok ekonomi lemah dalam kaitannya dengan aksi jihad secara fisik menjadi dekat. Kerentanan dekonstruksi nilai-nilai keagamaan dengan mudah dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dari jaringan radikal

dan membuat berbagai justifikasi terorisme sebagai satu-satunya jalan jihad yang dapat dilakukan dengan murah dan membuat sebuah wacana bahwa memaan itulah kebenaran dan kesucian dalam agama.

Dalam hal militansi yang terbungkus dalam semangat agama seperti contoh kasus yang telah disebutkan di atas, terjadi sebuah bentuk kekerasan dalam aktivitas yang dilakukannya. Dalam ajaran yang mereka bawa terdapat sebuah pembalikan nilai. Justru karena adanya asumsi bahwa penggunaan kekerasan merupakan salah satu metode pencapaian tujuan luhur, maka tidak aneh jika naluri agresif manusia terkadang tumbuh subur di bawah naungan agama.² Para ekstremis pelaku kekerasan tersebut pada umumnya didorong oleh keyakinan keagamaan, bahwa yang mereka lakukan itu sejalan dengan perintah Tuhan yang tercantum dalam teks suci.³

C. Ekstasi Revolusi dan Revolusi Ekstasi

Peristiwa dijatuhkannya bom atom di Kota Hiroshima oleh Amerika menjadi pemantik semangat melepas diri dari kolonialisme Jepang. Keadaan politik dan militer Jepang pada waktu itu mengalami penurunan drastis. Imbasnya penguasaan Jepang atas Indonesia juga melemah sehingga terjadi status quo di Indonesia. Kaum muda yang ketika itu mengetahui keadaan sebenarnya Jepang, langsung menghubungi Soekarno, dan meminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun sama-sama menginginkan kemerdekaan, tetapi muncul perdebatan mengenai proses proklamasi kemerdekaan antara golongan tua dan muda. Kekhawatiran golongan muda bahwa Soekarno akan mendapat pengaruh dari pihak Jepang akhirnya membawa pada peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Malam harinya, Soekarno kembali ke Jakarta dan bermalam di rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat dan menyusun teks Proklamasi. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB berkumandanglah Proklamasi, dan sorak-

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: MIZAN, cet. keempat: 1998), hal. 146.

³ *Ibid.*, hal. 147.

sorailah rakyat Indonesia. Saat yang amat ditunggu bertahun-tahun itu akhirnya terwujud juga : Indonesia merdeka.

Kemerdekaan yang sudah diperoleh dengan mengorbankan nyawa ini sepatutnya benar-benar kita pertahankan, dan kita kembangkan. Siapa lagi jika bukan generasi muda penerus bangsa yang melakukan hal itu. Kita sudah melepaskan diri dari kungkungan penjajah, karenanya seharusnya bisa melakukan pembaharuan tanpa dihalangi oleh pihak manapun. Tetapi, muncul pertanyaan tentang esensi kemerdekaan itu sendiri. Secara konstitusional Indonesia sudah memiliki syarat berdirinya suatu negara, meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Apakah hanya secara de facto atau de yure saja yang diraih negara ini dalam memaknai kemerdekaan?

Semua hal tersebut hanyalah efek dari perolehan “status merdeka”. Tetapi, hal itu bukan otomatis telah tercapai kemerdekaan secara holistik di semua kehidupan sebagai negara yang berdaulat. Apakah tangan-tangan kemerdekaan sudah menyentuh semua bagian dari negara bangsa ini? Kita tahu, angka kemiskinan masih amat memprihatinkan. Padahal dana pengentasan kemiskinan APBN tahun 2007 sudah cukup tinggi. Dari situs BPS diperoleh data, jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Jumlah angka pengangguran pun terhitung tinggi. Menurut pernyataan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2005), “Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 7 persen per tahun, maka kondisi ekonomi seperti Malaysia yang saat ini saja baru akan bisa dicapai oleh Indonesia pada tahun 2035”.

Hal tersebut menunjukkan dengan jelas, sebenarnya pemerintah Indonesia belum mampu membebaskan diri dari penjajahan laten berupa kemiskinan. Bahkan, hal ini masih diperparah dengan aksi korupsi para pejabat negara dari berbagai tingkat, sampai tingkat menteri pun menjadi tersangka kasus korupsi. Pemerintah Indonesia tidak berdaya dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan semangat pejuang kemerdekaan kita. Memang, posisi tawar dan kekuatan menyangkut hubungan diplomasi Indonesia masih lemah. Kita masih ingat, kasus

wasit karate Indonesia yang babak belur dihajar di Malaysia, dan kasus tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Hal itu menunjukkan kelemahan pemerintah Indonesia, atautkah bangsa ini amat mempertahankan ethic of responsibility-nya? Mohtar Mas'eed dalam *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* (1999) mengatakan bahwa pemerintah cenderung menekankan ethic of responsibility-nya sehingga akan lebih banyak mempertimbangkan akibat dan berkompromi dalam menyelesaikan suatu masalah.⁴ Kita sebagai bangsa sepertinya belum mengerti apa itu kemerdekaan yang sejatinya. Syarat formal terbentuknya negara, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah berdaulat, memang kita sudah punya. Tetapi, sebagai bangsa dan negara yang merdeka, kita baru dalam taraf merasa mempunyai wilayah negara saja, sedangkan isi kekayaan negeri ini diambil dan dinikmati oleh bangsa lain. Bahkan, di antara kita juga ada yang belum merasa menjadi satu bangsa Indonesia, dengan masih adanya gerakan sparatis. Dalam pandangan internasional pun, Indonesia dianggap belum mempunyai kekuatan, terlihat dari aksi-aksi dan "kebijakan internasional" yang amat merugikan Indonesia.

Sebagai bangsa, seharusnya kita mengerti arti kebesaran kita sebagai bangsa yang berpotensi besar. Kita akan menjadi bangsa dan negara yang kuat jika terdapat pemahaman yang bukan cuma semu tentang makna kemerdekaan. Wilayah luas dan strategis, jumlah penduduk besar, kekayaan alam melimpah, akan menjadi kekuatan yang sulit ditandingi oleh bangsa lain. Tetapi, lain ceritanya jika bangsa Indonesia sendiri tidak mau mengerti konsep dan pemanfaatan akan potensi-potensi yang dimilikinya tersebut. Hal itu justru hanya menjadi bumerang sebab akan mengundang ketertarikan bangsa lain untuk menguasai Indonesia, baik secara terang-terangan maupun tidak.

Marilah kita berbicara dalam tataran konsep. Rupanya, kemerdekaan dalam ranah konseptual kita tidak ubahnya masih dalam kurungan mental kaum terjajah. Terbukti bahwa dengan mudah konsep luar yang jauh akarnya dari kondisi dalam negeri masuk dan tumbuh mengesampingkan kondisi riil bangsa

⁴ Mohtar Mas'eed, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ketiga: 1999).

dan sistem tradisi. Dalam hal istilah tradisi tersebut, tentunya disertai dengan penjelasan bahwasanya itu adalah istilah yang menunjukkan keadaan sosial masyarakat, bukan dalam konteks linear kuno-modern/baru. Kita tidak membicarakan kapitalisme, globalisasi, dan liberalisme, atau mungkin sosialisme dan konsep senada yang lainnya. Dalam tingkatan religiusitasnya saja, agama, kita dengan mudah terombang-ambing konsep luar yang jauh hubungannya dengan Indonesia, tanah tempat kita tinggal sebagai simbol kontekstualitas.

Islam murni yang kembali kepada al-Qur'an dan hadist merupakan gerakan yang "baru" yang mulai populer di Indonesia selepas tahun 60-70'an, di mana revolusi Iran berlangsung. Revolusi Iran disebut-sebut sebagai "salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia". Bagi banyak kalangan, revolusi Iran 1978-1979 merupakan contoh murni Islam politis, "fundamentalisme Islam".⁵ Gerakan pengenaan cadar sebagai lambang protes dan menjadikan mereka anonim dilakukan pada saat itu, dan ini pun menjadi bagian integral dari konsep yang terbawa masuk melalui organisasi "transnasional" Islam. Gerakan Islam yang mulai bermunculan pada abad kedua puluh seperti Ihwan Al-Muslimin yang didirikan Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928, Jamaat Islami yang didirikan Abu Al-A'la Al-Maududi di Pakistan pada tahun 1941 adalah contoh penting dari gerakan-gerakan itu.⁶ Beberapa organisasi yang pada perkembangannya mengakibatkan beberapa gerakan Islam tersebut menjadi mempunyai peran-peran tertentu dalam perubahan politik di negara-negara Timur Tengah. Keberhasilannya yang membuat kekaguman dari generasi muda di daerah sekitarnya, tidak terkecuali di Indonesia, membawa pada ekspansi konsep ke luar Timur Tengah yang kemudian menimbulkan gerakan sejenis seperti pada masanya di negara yang "mengadopsi" konsep gerakan tersebut. Sedikit membuktikan bahwa istilah penekanan makna bahwa pakaian muslim identik dengan cadar adalah hal yang bias dan tidak jelas ukurannya, kasus di Mesir dapat memberikan sedikit

⁵ John O. Voll & John L. Esposito, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terjemahan "*Islam and Democracy*" (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hal. 66.

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

pemahaman –walaupun juga tidak dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak karena memang semua kasus adalah bersifat partikular. Sejak awal abad sebelas, wanita Mesir merupakan negara pertama di dunia Arab yang menyingkirkan kerudung.⁷ Hal tersebut dapat dibilang merupakan sebuah gerakan yang bernuansa “feminisme” di mana dalam aplikasinya akses perempuan terhadap pekerjaan dan hak sangat terjamin, walaupun mungkin beberapa dari undang-undangnya belum mencantumkan secara gamblang hak perempuan atas kaum prianya.

Gerakan “pemurnian” Islam yang memang sudah mulai tampak selepas dibukanya Terusan Suez dengan munculnya kondisi ongkos naik haji yang memang lebih murah. Dengan kondisi seperti itu, jelas, banyak orang yang pergi ke tanah Arab dan menuntut ilmu agama langsung dari pusatnya. Dengan konsep Islam yang diperoleh dari pusatnya dan diasumsikan sebagai Islam yang benar, gerakan reformasi keagamaan (Islam) mulai dicoba diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadi lebih terlihat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 60-70’an dengan kaum intelektual muda sebagai sasaran sekaligus aktor penyebaran konsep purifikasi Islam tersebut. Yang menjadi fenomena menarik pada perkembangannya mendekati sekarang adalah, bahwa masjid-masjid kampus menjadi basis konsentrasinya. Dengan kelebihannya di sisi populisnya, mahasiswa sebagai sasaran sekaligus aktornya ini mempunyai beberapa implikasi. Terlepas dari efektif tidaknya pendekatan yang dilakukan dengan metode seperti itu, hal yang menjadi cukup rumit adalah dari aspek ajaran keagamaan yang dikhawatirkan menjadi bias dan terdistorsi. Kita ingat pada era Walisongo, para tokoh fenomenal yang mengubah kondisi sosial budaya dan agama di tanah Jawa da sekitarnya, menggunakan pendekatan yang populis dan unik. Namun, yang menjadi titik beratnya adalah, bahwa para wali yang tergabung dalam dewan Walisongo tersebut mempunyai ilmu keagamaan yang valid. Mereka memiliki keahlian yang holistik terutama

⁷ John L. Esposito (Ed.), *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hal. 153-154.

dalam bidang keislaman, serta genealogi keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Kembali kepada permasalahan konsep “Islamisasi/ Islamisme” di Timur Tengah pada saat itu, Haideh Moghissi menjelaskan bahwa secara kategorisasi, terma “kelompok Islamis” terbagi dalam beberapa bagian/bentuk yang mempunyai aktivitasnya tersendiri.⁹ Yang pertama adalah kelompok yang cenderung apolitik, termasuk para ulama, hakim, dan pengikut biasa yang aktivitas mereka terbatas pada seminar, masjid, dan institusi keagamaan lainnya. Aktivitas mereka bersifat religius dan terpisah dari para ulama Sunni, ulama Syi’ah di Iran dan Irak secara historis masuk dalam kategori ini dan disebut sebagai kelompok diam (quietists). Kategori Islamis yang kedua adalah kelompok reformer liberal Islam. Kelompok ini mencoba mengubah masyarakat menurut ajaran Islam mereka. Kelompok ini dalam dilihat dari aktivitas Muhammad Abduh, tokoh Mesir. Yang terakhir, ketiga, mencakup kelompok fundamentalis.¹⁰ Di Indonesia, perkembangan konsep tersebut tidak berhenti sampai situ saja dan mencapai wilayah dalam negeri dengan “murni”. Perjalanan konsep menuju Indonesia tidak menafikan adanya distorsi dalam rangka euphoria revolusi Islam dengan menyebarnya informasi mengenai aktivitas tentara Hizbullah dan Hamas dengan kondisi peperangannya. Moghissi menambahkan analisisnya mengenai kelompok fundamentalisme bahwasanya, dengan tidak melupakan perbedaan antara berbagai kelompok, terdapat pembagian pandangan yang mereka pegang ke dalam tiga wilayah berkaitan, yaitu: anti-modernitas, anti-demokrasi, dan anti-feminisme. Dalam doktrinnya, gerakan fundamentalis merupakan utopia berorientasi masa lalu.¹¹

Mengenai permasalahan anti-modernis ini, terdapat beberapa hal menarik yang mungkin dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kontradiksi yang nyata. Dalam berbagai seminar

⁸ Ridin Sofwan, H. Wasit, H. Mundiri, *Islamisasi di Jawa. Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut Penuturan Babad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 233.

⁹ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 91.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 92.

¹¹ *Ibid.*, hal. 96.

dan pembahasan yang mengkaji persoalan negara Islam misalnya, terdapat satu hal diantara beberapa hal lain yang dapat diperhatikan, yaitu tidak adanya pembahasan mengenai partai politik yang mereka dukung. Dalam pembahasan mengenai destrukurisasi sistem pemerintahan tanpa menyentuh sistem pendidikan yang notabene sudah mencapai titik modernisasi dalam segala halnya. Organisasi dan partai yang mereka dirikan/dukung pun cenderung mempunyai rujukan pada organisasi modern, bahkan sering kepada Barat yang diasumsikan sebagai musuh Dunia Islam. Kelompok anti-demokrasi sendiri memandang uma selain Muslim sebagai ahl-dzimmi atau para pengikut agama besar lain (ahli kitab) termasuk orang Yahudi, Kristiani, dan Zoroaster. Implikasi selanjutnya dari cara pandang fundamentalis anti-demokrasi ini adalah bahwa umat selain Islam dapat hidup berdampingan namun paling tinggi sebagai warga kelas dua. Sedangkan mengenai sikap anti-feminisme, mereka mengecam perubahan dalam relasi gender yang digerakkan oleh menyebarnya kapitalisme dan feminisme.¹²

D. Agama dan Politik: Kontroversi Formalisasi Islam

Perdebatan mengenai isu penegakan syariat Islam dalam negara dan niat untuk melembagakannya dalam bentuk Undang-undang memang pernah santer diperbincangkan. Isu ini mencuat terlebih selepas kemerdekaan 1945 dengan keleluasaan bangsa untuk memformat negara dengan perginya kolonialisme. Dengan semakin maraknya komentar dari para “aktivis” Islam dan dengan kondisi de facto bahwa pada saat itu Soekarno menjabat sebagai Presiden, pada tahun 1954 sebuah konferensi para ulama yang diselenggarakan di Cipanas di bawah Menteri Agama, Kiai Masykur, mengangkat Soekarno dan pemerintah sebagai “Walyul amri ad-daruri bisy-Syaukah”. Gelar ini membuat Soekarno menjadi seorang Kepala Negara yang sah dan harus dipatuhi semua umat Islam.¹³

Majelis Konstituante yang dipilih pada tahun 1955 tidak menunjukkan hasil kinerjanya yang signifikan selama tahun

¹² *Ibid.*, hal. 98.

¹³ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 47.

1956-1958. Yang paling merintanginya ialah masalah dasar negara, antara pendukung negara sekuler/ netral-agama dan Islam politik belum menemukan kesepakatan juga. Keputusan tersebut diprotes oleh Masyumi karena dianggap kurang tepat dan merupakan bencana bagi perjuangan Islam, sebab negara Indonesia belum berlandaskan Islam menurut mereka masih bisa diraih dalam Majelis Konstituante mendatang.¹⁴

Sebelumnya, mungkin ada baiknya melihat konsep politik yang sudah bergerak secara mendunia dan sangat mempengaruhi perkembangan konsep pemikiran, baik dalam ranah pemikiran Islam dan segala pola pikir serta “ritualisasinya”, dan secara politiknya. Yang Pertama adalah pemikiran politik Sunni, ini secara umum merupakan teori politik kenegaraan yang berpandangan khalifah sentris. Kepala negara menduduki posisi penting dengan kekuasaan yang luas. Walaupun masalah kepemimpinan (imamah) bukan merupakan bagian dari rukun iman, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara dengan kepatuhannya.¹⁵ Kedua, pemikiran politik Khawarij yang dalam bidang ketatanegaraan ini bersifat lebih demokratis. Dalam hal khalifah, menurut mereka, jabatan itu terbuka bagi setiap lelaki muslim yang mampu berlaku adil, baik budak Afrika maupun yang merdeka. Jika seorang khalifah telah terpilih maka tidak dibenarkan turun tahta.¹⁶ Ketiga, pemikiran politik Mu'tazilah, yang secara umum konsepsi ini menegaskan bahwa imamah dan kepemimpinan negara itu pilihan rakyat. Kepala negara tidak mesti berasal dari suku Quraisy, yang penting beragama Islam dan adil. Bagi Mu'tazilah, pengangkatan kepala negara tidak lagi wajib jika keadilan telah benar-benar merata di kalangan rakyat dan sudah tidak ada lagi ancaman.¹⁷ Yang terakhir, Keempat, adalah pemikiran politik Syi'ah. Imamah dalam Syi'ah mempunyai konotasi agama, bahkan merupakan bagian dari rukun iman yang harus diyakini selain tauhid, kenabian, kehidupan setelah mati, dan keadilan. Maka dari

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Syafiuddin, M.A., *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media), hal. 111.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 112.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 113-114.

itu, imam mempunyai kekuasaan penuh, baik agama maupun kekuasaan negara.¹⁸

Di Indonesia, dengan mayoritas umat Islam berhaluan Sunni, dan dengan berbagai proses dialektikanya, maka nuansa yang terbentuk dalam konteks agama dan negara mengalami bentuk yang unik. Ungkapan seorang ilmuwan, Giovanni Sartori, “Jika kita berbicara tentang pengalaman Barat, apakah kata kuncinya itu ‘Barat’ atau ‘pengalaman?’”¹⁹ Hal yang diungkapkan ilmuwan yang mempunyai nama bernuansa Barat ini juga tidak bisa selayaknya serta-merta langsung ditentang karena namanya itu. Argumen bahwa agama harus dipisahkan dengan perpolitikan maupun kegiatan bernegara juga sebenarnya merupakan bumerang bagi argumen itu sendiri. Walaupun dimaksudkan supaya agama tidak “tercemar” urusan politik, namun itu menjadi sebuah kedangkalan pemahaman. Agama dan politik/negara seharusnya malah tidak boleh dipisahkan. Hal ini karena kegiatan politik dan bernegara harus dilandasi dengan nilai Islam.²⁰

Berbagai kajian dan kritikan mengenai konsep negara Islam di daerah asalnya muncul pun terjadi, bukan hanya oleh orang dari negara berbeda haluan agama saja kritik dan kajian tersebut dilakukan. Sebagai contoh adalah pemikiran Maududi mengenai negara Islam yang disebutnya sebagai “kerajaan Tuhan” (ilah-i-hukumat). Namun, penekanan Maududi terhadap kedaulatan Tuhan yang dialihkan ke dalam kedaulatan politik ini, akan membuatnya menjadi mempunyai kelemahan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah bahwa dengan membawa kedaulatan Tuhan ke dalam ranah pembicaraan kedaulatan politik, akan membatasi kedaulatan Tuhan hanya pada suatu bentuk negara saja yaitu negara Islam. Konsekuensi yang muncul dari hal ini adalah bahwa Tuhan tidak dapat berdaulat di luar negara Islam yang diperjuangkan tersebut.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁹ Voll, John O. & Esposito John L., 1999:19.

²⁰ Sayfa Auliya Achidsti, “Otokritik dan Pergulatan Nilai Demokrasi di Indonesia”, dalam, *Renaissans Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2009), hal. 27-232.

²¹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: MIZAN, cet. kedua:1990), hal. 60-61.

Semestinya, jika yang dimaksud dengan Tuhan adalah pemegang kedaulatan tertinggi, keberadaan Tuhan tidak harus dibatasi dengan sebuah batasan administratif seperti persoalan bentuk negara, struktur, sistem politik, dan lain sebagainya. Tuhan merupakan dzat tertinggi bagi semesta alam dan seluruh umat manusia. Mengenai hal tersebut, dalam konteks Indonesia, menjadi sebuah justifikasi bahwasanya hal yang sangat rumit jika negara ini harus diislamkan secara fisik. Pada satu sisi, hal tersebut menjadi bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil 'alamin yang merupakan keunggulannya. Ajaran bahwa Islam adalah agama bagi semesta alam akan berbenturan dengan beberapa anggapan sempit perjuangan Islam secara fisik dalam negara, dan membuat situasi yang kontraproduktif.

Mengubah bentuk negara dalam tingkatan fisiknya dan menggantikan Indonesia menjadi negara Islam, adalah sebuah dekonstruksi besar-besaran dan manjadi layaknya permainan zero sum antara segelintir muslim tertentu dengan umat selain Islam bahkan muslim yang tidak setuju itu sendiri. Memperjuangkan Islam secara fisik tersebut juga malah akan menimbulkan konfrontasi antara satu dengan yang lain. Padahal hal ini bukanlah sesuatu yang urgen. Lagipula keinginan memperjuangkan Islam secara fisik supaya Indonesia menjadi negara Islam tak ubahnya sebagai cerminan Arab sentris, tanpa mendiskreditkan negara Arab tentunya.

Politik identitas menjadi prioritas di sini yang sebenarnya hanya merupakan sebuah fiksi dalam konteks Arab (dalam hal ini maksudnya adalah Islam) dan Barat. Masing-masing sisinya dianggap homogen (sama semua) dan bertentangan satu sama lain, padahal sebenarnya tidak.²² Di mana sebenarnya Indonesia sudah dapat hidup nyaman dengan keadaan seperti ini dan umat muslim sudah dapat hidup tenang menjalankan agamanya adalah hal utama yang harus dipertahankan, bukan malah membuat "terobosan baru" pecetusan "negara Islam" yang dapat

²² Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*, terjemahan "*Power and Culture: Interviews with Edward W. Said*" (Indonesia: Pustaka Prometheus, 2003), hal.543-556.

membuat konfrontasi dan ketidaktenangan muslim itu sendiri nantinya.²³

Perdebatan mengenai agama dan negara ini sendiri dimulai dengan perbedaan pendapat dua golongan. Yang pertama menganggap bahwa dalam negara, Islam adalah landasan moral. Jadi jika semangat Islam (nilai) tetap berkobar, niscaya Islam pula negara itu. Pemikiran ini disebut dengan aliran substansialis. Namun yang kedua berpendapat bahwa negara Islam yang harus dibentuk adalah supaya hukum Islam dapat dijalankan. Pemikiran ini disebut juga aliran formalistik.²⁴ Dalam hubungannya antara ketuhanan dengan negara, seperti yang telah dijelaskan tadi, akan tepat mungkin jika disebut instrumental. Logis memang jika mengkritisi konsep formalisasi Islam dalam format sebuah negara merupakan sebuah proses intrumentalisasi di mana instrumen dimaknakan cukup berbeda sebagai sebuah tujuan.

Yang jelas adalah bahwa keduanya merupakan pilihan dengan segala konsekuensinya. Namun, yang harus ditegaskan adalah bahwa sebuah agama merupakan roh yang mempunyai tempat sebagai dasar segala hal, namun tidak tampak. Itulah sebuah inti dari agama dan sebuah Ketuhanan. Abdurrahman Wahid dalam pemikirannya mengenai Islam, membagi pendekatan yang digunakan umat Islam dalam menampilkan citra Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat ke dalam tiga varian.²⁵ Pertama, pendekatan sosio politik yang menekankan perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan. Sikap sektarian amat mudah muncul dan berkembang dalam ranah pendekatan seperti ini. Kedua adalah pendekatan kultural total yang berkeinginan untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa keterkaitan dengan kelembagaan apapun kecuali dalam rangka penyebaran Islam secara budaya itu

²³ Greg Feally, *Ijtihad Politik Ulama*, terjemahan "Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama" (Yogyakarta: LKis, 1998) hal. 62-85.

²⁴ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa* (Jakarta:LP3ES, 2009), hal. 155-156.

²⁵ Lihat Abdurrahman Wahid, "NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang," dalam M. Imam Aziz, *et. Al. (Ed.) Agama, Demokrasi, dan Keadilan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 222f.

sendiri. Namun ini juga dapat mengakibatkan implikasi bahwa sering terjadi mutasi watak pendekatan ini ketika sejumlah proponennya berubah menjadi penuduh pihak lain mengganggu sistem kekuasaannya pada saat hendak mengambil sikap hendak masuk. Akhirnya, sikap ini hampir serupa dengan pendekatan yang pertama. Ketiga, pendekatan sosio kultural yang menekankan pada sikap pengembangan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang ingin dicapai itu.²⁶

Dengan itu maka segala bentuk fisik, apapun itu dan di mana pun, akan mempunyai nafas sejalan dengan agama dan Ketuhanan yang dipegang. Pembentukan agama sebagai sebuah “bangunan” fisik merupakan sebuah usaha yang sebenarnya amat riskan, di mana sebuah roh yang sejatinya transenden dan lintas-batas menjadi mempunyai batasan-batasan tertentu dan lebih pragmatis, kehilangan sifat transendennya yang menjadi kekuatan dari agama itu sendiri dalam kehidupan individu dan bermasyarakatnya.

²⁶ A. Gaffar Karim, *MetamorfosisNU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), hal. 110.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Sayfa Auliya. 2009. "Otokritik dan Pergulatan Nilai Demokrasi di Indonesia", dalam *Renaissans Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Amal, Taufik Adnan. 1990. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: MIZAN.
- Feally, Greg. 2007. *Ijtihad Politik Ulama*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andree. 1999. *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Mas'ood, Mohtar. 1999. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Karim, A. Gaffar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- L. Esposito John. (Ed.). 1985. *Islam dan Perubahan Sosial-Politik di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: PLP2M.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa Silang Budaya. Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Said, Edward W. 2003. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan Indonesia*: Pustaka Prometheus.
- Shihab, Alwi. 1998. *Islam Inklusif*. Bandung: MIZAN.
- Sofwan, Ridin. 2004. *Islamisasi di Jawa. Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut Penuturan Babad*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiuddin, 2007. *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Gama Media.
- Voll, John O. & Esposito, John L. 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Penerbit Mizan.